

**MENCIPTAKAN GENERASI YANG BERWAWASAN GLOBAL  
BERKARAKTER LOKAL MELALUI HARMONISASI NILAI KOSMOPOLITAN  
DAN NASIONALISME DALAM PEMBELAJARAN PKN**

**Dodik Kariadi**  
STKIP Singkawang  
dodik\_kariadi@yahoo.com

**ABSTRACT**

This article is the result of a study on the harmonization of cosmopolitan value and nationalism in teaching civics as well as how these two ideas could create educational output that has global knowledge but do not forget a good personality or character that has been planted since the beginning. The study was motivated by the severe problems of the national consciousness (national consciousness) young people today who need serious revamping. In the era of globalization, the Indonesian people are faced with two major forces that are in tandem with globalization cosmopolitanism and nationalism with a marked weakening of the emergence of ideas of regionalism, broad autonomy, separatism and racial conflicts. Based on this, the study of how the process of harmonization of cosmopolitan values and nationalism in teaching civics and how the ideas can be a way for the creation of a sound education global output but remain local in character. Despite the fact that conceptually there is a contradiction between the cosmopolitan values of nationalism, both are at the poles of attraction, where the value of cosmopolitan pulled into the global sphere, while the value of nationalism pulled into the exclusive domain. In such a situation Civics learning is expected to be a bridge to harmonize both values. Value cosmopolitan and nationalism became the crucial factor in developing a global perspective but does not eliminate local character when done through learning Civics quality, quality and meaningful.

**Keywords: Cosmopolitan, Nationalism**

**A. PENDAHULUAN**

Kosmopolitanisme bila disandingkan dengan nasionalisme, posisinya hingga kini masih menuai perdebatan. Kosmopolitanisme berfokus pada dunia sebagai sebuah keseluruhan daripada sebuah lokalitas atau kelompok tertentu di dalamnya (Calhoun, 2008: 428). Kosmopolitanisme juga merujuk pada penghargaan terhadap perbedaan dalam lokalitas negara. Dalam bentuk kata benda, kosmopolitanisme sering diidentikkan dengan perbedaan aktual dari kota atau negara secara spesifik. Kota-kota di dunia yang sering disebut-sebut sebagai kota terkosmopolit adalah Paris, London, dan New York. Gelar kota kosmopolitan diberikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain dari segi kekuatan *political power*, peran media yang masif, ekonomi dan finansial yang kuat, basis atau kutub sains yang maju, dan memiliki pusat kesenian yang besar. Kosmopolitanisme

seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan interkoneksi dari keseluruhan dunia yang melewati batas nasional maupun batas lainnya (Calhoun, 2008: 428). Ulrich Beck (2006: 136) dalam artikel Craig Calhoun mengatakan bahwa terdapat dua proses yang saling berhubungan. Pertumbuhan interkoneksi dianggap Beck sebagai “kosmopolitanisasi”. Sedangkan kosmopolitanisme lebih kepada bagaimana menyikapi kosmopolitanisasi sebagai sumber tanggung jawab moral bagi semua orang.

Secara normatif, interkoneksi dan perbedaan dalam dunia berimplikasi memuaskan bagi semua orang. Namun, pertumbuhan koneksi global malah menimbulkan kekhawatiran tersendiri daripada apresiasi terhadap perbedaan atau perasaan tanggung jawab etis kepada orang asing yang berada di luar sana (Calhoun, 2008: 429). Globalisasi dapat mengarahkan kepada pembaruan

nasionalisme atau memperkuat batas-batas. Dengan kata lain, adanya fenomena globalisasi malah memperkuat atau memunculkan nasionalisme, sebagaimana yang terjadi pasca serangan 9/11. Beck juga mengatakan bahwa kosmopolitanisme merupakan perspektif dimana masyarakat global saling berkooperasi demi menangani isu-isu bersama, misalnya isu degradasi lingkungan, yang akan membuat masyarakat bersama-sama masuk menjadi "*community of fate*" (Calhoun, 2008: 429).

Kosmopolitanisme memandang nasionalisme bukan sebagai gerakan perlawanan terhadapnya, tetapi merupakan sebuah revisi dari ideologi lokal yang membuat masyarakat yang awalnya parokial menjadi inklusif (Wicaksana, 2013: 13). Nasionalisme bukanlah gerakan yang berbahaya, karena nasionalisme dipandang sebagai sebuah gerakan progresif yang dinamis, dimana nasionalisme sendiri pada suatu waktu akan berkembang menjadi kosmopolitanisme dan meninggalkan nilai-nilai nasionalismenya. Tahap dinamis ini bisa dilihat dari banyaknya diskursus mengenai multikulturalisme di sejumlah negara (Wicaksana, 2013). Multikulturalisme (*salad bowl*) sendiri dapat diartikan seperti ini, yakni meskipun bergabung menjadi satu, tapi identitas masing-masing orang dalam komunitas tersebut tetap ada dan bentuk aslinya masih dipertahankan. Dapat diketahui disini bahwa kosmopolitanisme memandang nasionalisme bukan sebagai gerakan yang mengancam.

Sedangkan dalam memandang kosmopolitanisme, nasionalisme menganggap bahwa pemikiran ini sangat berbahaya bagi eksistensinya. Terdapat tiga tantangan dan kendala yang dihadapi nasionalisme terkait dengan adanya kosmopolitanisme. Pertama, diskursus dan wacana mengenai universalisme yang diusung kosmopolitanisme dianggap penetratif dan sebagai upaya imperialisme. Kedua, komersialisasi dan ekonomisasi yang dianggap dapat memudahkan nasionalisme akibat adanya tuntutan ekonomi. Ketiga, etnonasionalisme yang muncul akibat retaknya *sense of belonging* yang disebabkan karena ketidakpuasan

terhadap pemerintah yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat (Wicaksana, 2013). Sehingga dapat diketahui bahwa nasionalisme menganggap bahwa kosmopolitanisme merupakan ancaman yang cukup besar baginya.

Dari pemaparan di atas, nasionalisme dan kosmopolitanisme memang terlihat inkompatibel satu sama lain sehingga sukar untuk membuat mereka saling berjalan beriringan. Namun, kondisi tidak selalu berjalan demikian. Ada kondisi tertentu yang membuat mereka bisa saling melengkapi bahkan kompatibel. Kosmopolitanisme pada dasarnya memberi ruang penting pada peran individu dalam membentuk komunitas. Dengan adanya kosmopolitan pada globalisasi akan menciptakan relasi-relasi sosial, kosmopolitanisme menegaskan bahwa perbedaan kultur individu, kelompok dan bangsa, dan dialog antar kelompok tersebut, sebagai batu pijakan dalam membangun tatanan komunitas global. Dalam globalisasi, posisi nasionalisme bisa dikatakan semakin kuat, karena timbulnya globalisasi dapat mendorong individu untuk semakin meningkatkan rasa nasionalismenya.

## B. Metode Penelitian

### 1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif-kritis. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran data tersebut untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif atau normatif dengan mengadakan klasifikasi, penilaian standar norma, hubungan dan kedudukan suatu unsur dengan unsur lain.

Dalam penjelasannya lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang ada. Sumber-sumber tersebut di peroleh dari berbagai buku dan tulisan-tulisan lainnya dengan mengandalkan teori-teori yang ada untuk diinterpretasikan secara jelas dan mendalam untuk menghasilkan tesis dan anti tesis (Soejono, 1999: 25).

Studi ini mendasarkan kepada studi kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya (Mustika Zed, 2004: 2-4).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif-kritis dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah kepada pembahasan. Sumber-sumber tersebut di dapat dari karya yang di tulis oleh intelektual dan ahli yang berkompeten tentang pendidikan yang terdapat dalam daftar pustaka.

## 2 Data yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini bersifat kualitatif tekstual dengan menggunakan pijakan terhadap statement dan proporsi-proporsi ilmiah yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan dan psikologi yang erat kaitannya dengan pembahasan.

## 3 Sumber Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan personal dokument sebagai sumber data penelitian ini, yaitu dokumen pribadi yang berupa bahan-bahan tempat orang yang mengucapkan dengan kata-kata mereka sendiri (Furqan, 1992: 23). Personal Document sebagai sumber dasar atau data primernya,

dalam hal ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan konsepsi dan urgensi pelaksanaan mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam pembelajaran tematik yang tentunya merupakan komponen dasar dalam penelitian ini

## 4 Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, web(internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan kajian tentang harmonisasi nilai kosmopolitan & nasionalisme melalui PKn untuk pendidikan berwawasan global berkarakter lokal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah mencari suatu data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti-prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002: 83). Hal ini dilakukan dengan analisis wacana (*discourse analysis*) supaya tidak tumpang tindih dalam melakukan analisa.

## 5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk-bentuk dalam teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut (Winarno, 1990: 139). Pendapat analisis data deskriptif tersebut adalah data yang kumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan dalam bentuk angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Moleong, 2002: 16). Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk

memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Kajian ini di samping itu dengan cara analisis isi dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan dengan memilah data tersebut. Sebagai syarat yang dikemukakan oleh Noeng Muhajir tentang *Content Analysis* yaitu, objektif, sistematis, dan general (Muhaji, 1906: 69).

Metode Pembahasan Untuk mempermudah dalam penulisan ini, maka sangat diperlukan untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yaitu: 1) Metode induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus dan kongkrit, kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. 2) Metode deduktif adalah metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum itu hendak menilai sesuatu kejadian yang sifatnya khusus. 3) Metode komparasi adalah meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain, dan penyelidikan bersifat komparatif (Winarno, 1990: 139).

### C. PEMBAHASAN

Sebelum lebih jauh dalam memahami bagaimana harmonisasi kosmopolitan & nasionalisme untuk membangun pendidikan berwawasan global berjiwa lokal, maka terlebih dahulu kita akan masuk ke hal-hal pokok yang terkait dengan hal ini. Setelah memahami konsep dasar dari pokok permasalahannya maka hal utama yang terkait dengan judul makalah ini. Diantara hal-hal pokok tersebut adalah konsep dasar dari kosmopolitan, Nasionalisme, pendidikan kewarganegaraan dan wawasan global

serta skenario yang sudah jalankan sehingga apa tujuan utama yang tertera pada judul makalah dapat tercapai. Dibawah ini akan dijelaskan deskripsi data terkait dengan judul makalah ini.

#### 1. Kosmopolitanisme Indonesia dan pendidikan berwawasan global

Secara etimologi kosmopolitan berasal dari kata kosmos yang berarti jagat raya, sedangkan kosmopolitan itu sendiri merupakan penduduknya dari berbagai penjuru; yang memiliki wawasan atau pengetahuan yang luas. Dalam hubungan internasional, pemikiran politik yang berdasarkan konsep negara-bangsa begitu mendominasi. Hal ini tidak salah karena memang negara-bangsa adalah entitas politik yang masih bertahan lama hingga kini. Namun institusi negara yang diharapkan bisa melindungi warga negaranya, pada dasarnya tidak menempatkan manusia sebagai nilai tertinggi. Pengejaran kepentingan nasional diutamakan, sementara hak individu seringkali terabaikan. Dalam hal ini, pemikiran kosmopolitanisme mencoba untuk memberikan pandangannya mengenai manusia sebagai tujuan, bukan alat.

Demikian juga dengan bangsa Indonesia pada era globalisasi ini dihadapkan pada kekuatan utama yang dapat menghimpit semangat nasionalisme, yakni nilai kosmopolitan yang beriringan dengan globalisasi. Held (1999) & Giddens (2004) memiliki kesamaan pemikiran mengenai globalisasi, khususnya untuk Held, dikaitkan dengan istilah kosmopolitansime, yakni mereka mengajukan gagasan atas “globalisasi” yang memiliki kecenderungan “negatif”, seperti mendorong konsumerisme, homogenisasi tertentu yang membawa efek negatif pada identitas lokal, menguatkan neo-liberalisme dsb. Hal tersebut disebabkan globalisasi akan dapat mengancam budaya bangsa sehingga budaya kosmopolitan yang dihasilkan oleh globalisasi akan muncul dan dapat mematikan budaya nasional atas suatu bangsa (Tilaar, 2002: 4) dan

dapat mempersempit ruang gerak (Kalidjernih, 2009: 29) Sementara itu, “globalisasi positif” yang diasosiasikan dengan cita-cita nilai kosmopolitan, seperti kesadaran dan upaya-kerja sama dalam skala global dalam mengatasi pelbagai masalah lokal dan nasional, dibangun pelbagai badan dunia untuk kemaslahatan umat manusia yang tidak mungkin diatasi oleh sebuah negara secara individu, tetapi perlu merangkul negara-negara lain. Contoh lain yang berkenaan dengan nilai kosmopolitan adalah degradasi ekologi, seperti ikhwal karbon sebagai akibat pembabatan hutan dan kebakaran lahan. Uni Eropa menyokong dana, pakar dan pengetahuan dalam mengatasi masalah ini. Sementara itu, beberapa negara lain, seperti Indonesia, terlibat meminimalkan degradasi tersebut.

Kerangka untuk membangun budaya kosmopolitan dalam dunia pendidikan yang berdasarkan PKn maka dalam proses pelaksanaan pendidikan harus menghilangkan batasan etnis, suku, ras, serta penanaman nilai-nilai yang tertuang dalam PKn dalam rangka memperoleh output yang memiliki wawasan yang luas sehingga menghasilkan suatu budaya kosmopolitan dalam tatanan dunia global seperti halnya sekarang ini.

Dialog dalam masyarakat dunia yang kompleks. Kosmopolitanisme pada dasarnya memberi ruang penting pada peran individu dalam membentuk komunitas. Dengan dampak globalisasi pada relasi-relasi sosial, kosmopolitanisme menegaskan bahwa perbedaan kultur individu, kelompok dan bangsa, dan dialog antar kelompok tersebut, sebagai batu pijakan dalam membangun tatanan komunitas global. Secara umum kosmopolitanisme merupakan harapan ideal tentang warga dunia tanpa perbatasan, Pandangan lintas kultural dalam kosmopolitan ini memberi arti akan pentingnya dialog dalam sebuah komunitas dengan landasan saling mengakui dan menghargai, dimana

perbedaan pada manusia dianggap sebagai inti dalam menciptakan kehidupan dunia yang damai.

Sebagaimana yang telah dicita-citakan dalam UU SISDIKNAS “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.

Sejalan dengan dunia yang semakin menglobal (*globalizing world*) dalam tradisi ilmu sosial nilai kosmopolitan dianggap sebagai oposisi dari nasionalisme (Kalidjernih, 2009, hlm. 1). Atau dengan kata lain, nasionalisme secara ideologinya adalah anti kosmopolitanisme (Jaafar, 2009: 18-20). Selain itu, kosmopolitanisme sebagai suatu etika politik ideal muncul sebagai suatu proyek kenegaraan dalam bentuk baru yang terbentuk dengan melampaui batas-batas sebuah negara dan pemerintahan transnasional seperti halnya kemunculan dari satu hukum masyarakat global yang kokoh (Nowicka dan Rovisco, 2009: 1-5). Sehingga nasionalisme dan kosmopolitan dapat dipahami sebagai dua sisi yang saling berkaitan. Apabila nasionalisme menyangkut paham kebangsaan berupa kesetiaan warga negara terhadap negaranya, maka kosmopolitan sebaliknya merujuk kepada kondisi bahwa seseorang merasa adalah bagian keseluruhan secara global sehingga seringkali hilang identitasnya sebagai warga negara suatu bangsa (Mardawani, 2011, hlm. 56).

Dengan demikian, kosmopolitanisme sering dilabelkan pada individu yang bergerak secara fisik dan berada di luar asal mereka serta menghadirkan suatu jenis budaya spesifik, atau orang-orang yang sudah belajar dan merasa nyaman dalam setting budaya yang beragam (Mau, S, Mewes, J & Zimmermann, 2008: 4). Dalam pengertian lain, nilai kosmopolitan merujuk kepada suatu paham atau gagasan bahwa semua manusia, tanpa memandang latar belakangnya adalah anggota dari sebuah komunitas (Kalidjernih, 2009, hlm. 4). Maksudnya, nilai kosmopolitan mengarahkan kepada suatu kehidupan yang “tanpa-batas” (*borderless*) yang erat kaitannya dengan globalisasi sehingga nilai kosmopolitan dapat juga dianggap sebagai ideologi yang menganggap semua kelompok etnis manusia milik sebuah komunitas tunggal berdasarkan pada moralitas bersama.

Pada tingkatan umum, nilai kosmopolitan dapat diuraikan sebagai suatu orientasi dan suatu kesediaan untuk terlibat dan berinteraksi dengan pihak lain (Mau, S, Mewes, J and Zimmermann, 2008: 3). Hal tersebut memerlukan suatu keterbukaan yang estetis dan intelektual ke arah pengalaman budaya yang berbeda, suatu pencarian keragaman budaya bukannya keseragaman (Held, 1996: 103). Bagaimanapun juga, pemahaman konsep tersebut dapat diterapkan dengan maksud sangat berbeda dan pada gejala berbeda berkisar antara perspektif filosofis, etis dan ideologis ke sikap individu, seperti halnya ke agama, kota dan lingkungan pergaulan budaya mereka (Roudometof, 2005: 116). Nilai kosmopolitan tidak sendiri dalam mempengaruhi wawasan global. Nilai lain yang juga mengemuka dan menguat adalah nilai nasionalisme.

## 2. Nasionalisme Indonesia dan karakter lokal

Nasionalisme berasal dari kata *nation* (bangsa). Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan yang tertinggi terdapat harus

diserahkan pada negara kebangsaan. Taniredja (2013: 185) menyebutkan bahwa “Perasaan mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya. Dan nasionalisme tersebut semakin lama semakin kuat peranannya dalam membentuk semua segi kehidupan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi.”

Hertz (Taniredja, 2013: 199) menyebutkan bahwa, Nasionalisme adalah suatu ideologi yang meletakkan bangsa dipusat masalahnya dan berupaya mempertinggi keberadannya untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bangsa. Sebagai ideologi, nasionalisme dapat memainkan tiga fungsi yaitu mengikat semua kelas, menyatukan mentalitas, dan membangun atau memperkokoh pengaruh terhadap kebijakan yang ada dalam kursi utama ideologi nasional.

Taniredja (2013: 186) menyebutkan bahwa “Atas dasar tiga konsep bangsa, negara, dan negara bangsa maka yang dimaksud dengan nasionalisme adalah sentimen yang menganggap diri sebagai bagian seperangkat simbol, kepercayaan dan pandangan hidup dan yang memiliki kemauan untuk menentukan nasib atau takdir politik (*political destiny*) bersama.” Nasionalisme adalah keinginan untuk hidup bersama demi mempertahankan kesatuan, persatuan dan identitas bangsa.

Selanjutnya menurut Ernest Renan, dalam bukunya *Qu'est ce qu'une Nation* melihat bahwa “hakikat nasionalisme adalah *le desire vivre ensemble* (keinginan untuk hidup bersama) atau *le desire d'etre ensemble* (keinginan untuk eksis bersama).” Taniredja (2013: 186) menyebutkan bahwa “Nasionalisme bertumpu pada kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual yang berakar kepada kepahlawanan masa lalu, dan tumbuh karena penderitaan bersama, dan kesenangan bersama.”

Hayes dalam Taniredja (2013: 187) membedakan empat arti nasionalisme yaitu:

- a. Sebagai suatu proses sejarah aktual, yaitu proses sejarah pembentukan nasionalitas sebagai unit-unit politik, pembentukan suku dan imperium kelembagaan negara nasional modern.
- b. Sebagai suatu teori, prinsip atau implikasi ideal dalam proses sejarah aktual.
- c. Nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan politik, seperti kegiatan partai politik tertentu, penggabungan proses historis dan suatu teori politik.
- d. Sebagai suatu sentimen, yaitu menunjukkan keadaan pikiran diantara satu nasionalitas.

Nasionalisme memiliki dua dimensi yang saling terkait yaitu dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal merujuk pada kemampuan domestik untuk menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan nasional, terutama consensus nasional untuk memperkecil dan bahkan meniadakan konflik-konflik internal. Sedangkan dimensi eksternal mencerminkan kemampuan nasional suatu bangsa-bangsa dalam menjalankan hubungan luar negerinya dengan berbagai faktor Negara lainnya. Nasionalisme menjadi salah satu determinan penting dalam politik luar negeri suatu negara. Bahkan banyak teoritis politik luar negeri menyatakan bahwa nasionalisme akan mempengaruhi efektivitas politik luar negeri suatu negara.

Nasionalisme terdiri dari dua aspek, yaitu *risorgimento* dan *integral*. *Risorgimento nasionalism* mengacu pada upaya pembebasan dari tekanan sosial dan politik yang dihadapi oleh suatu kelompok masyarakat dalam upayanya membentuk dan membangun rasa kebangsaan. Sedangkan *integral nasionalism* mengacu pada pembentukan dan pembangunan paham kebangsaan yang terus berkelanjutan dalam suatu negara-bangsa.

Dalam sejarahnya, nasionalisme Indonesia melalui beberapa tahap

perkembangan yang terbagi menjadi empat tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama ditandai dengan tumbuhnya perasaan kebangsaan dan persamaan nasib yang diikuti dengan perlawanan terhadap penjajahan baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan. Nasionalisme religius dan nasionalisme sekuler muncul bersamaan dengan munculnya gagasan Indonesia merdeka. Upaya dari nasionalis Islam untuk mendirikan negara yang berlandaskan Islam dan kalangan nasionalis sekuler yang ingin mempertahankan negara sekuler berdasarkan Pancasila dijadikan patokan untuk menganalisis kesadaran kebangsaan atau perasaan nasionalisme bangsa.
- b. Tahap kedua adalah bentuk nasionalisme Indonesia yang merupakan kelanjutan dari semangat revolusioner pada masa perjuangan kemerdekaan, dengan peran pemimpin nasional yang lebih besar. Nasionalisme pada era ini mengandaikan adanya ancaman musuh dari luar terus-menerus terhadap kemerdekaan Indonesia.
- c. Tahap ketiga adalah nasionalisme persatuan dan kesatuan. Kelompok oposisi atau mereka yang tidak sejalan dengan pemerintah disingkirkan karena akan mengancam persatuan dan stabilitas nasional. Perbedaan diredam bukan dengan menyelesaikan pokok persoalan tetapi ditindas dan disembunyikan. Terhadap luar negeri, nasionalisme berarti kedaulatan, integritas, dan identitas bangsa. Tekanan agar ada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, demokrasi dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai campur tangan asing terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Nilai-nilai universal oleh penguasa Orde Baru dianggap bertentangan dengan nilai-nilai bangsa atau demokrasi Pancasila.

d. Tahap keempat adalah nasionalisme kosmopolitan. Dengan bergabungnya Indonesia dalam sistem global internasional, nasionalisme Indonesia yang dibangun adalah nasionalisme kosmopolitan yang melandaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa tidak dapat menghindari dari bangsa lain, namun dengan memiliki nasionalisme kultural ke Indonesia an dengan memberikan kesempatan kepada aktor-aktor di daerah secara langsung untuk menjadi aktor kosmopolit. Dalam konteks dan kecenderungan global ini, semakin banyak orang membayangkan menjadi warga dunia dan terikat pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Karena itulah nilai-nilai dan semangat generasi baru produk modernisasi dan globalisasi sekarang tidak dapat dipahami dalam pengertian lama nasionalisme, yaitu cinta dan pembelaan kepada tanah air secara total bahkan membabi buta. Nilai-nilai, semangat, dan patriotisme mereka mestinya diletakkan dalam semangat pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Mengenai masa depan nasionalisme pada era negara-negara dunia, Guibernau (Taniredja (2013: 204) menegaskan bahwa setelah dengan ideologi yang diimpor, nasionalisme berhasil merekat penduduk yang heterogen menentang kolonialisme, maka perlu upaya merekonstruksi identitas asli (nasional) dalam melancarkan proses *nation-building*. Nasionalisme dapat memainkan dua peranan pokok, yaitu sebagai ideologi yang mengatasi loyalitas dan solidaritas parokial.

Nasionalisme menandakan sikap kebangsaan yang positif, yakni mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme sangat berguna untuk membina rasa bersatu antar penduduk negara yang heterogen (karena

perbedaan suku, agama dan asal usul) dan berfungsi untuk membina rasa identitas dan kebersamaan dalam negara serta bermanfaat untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, bahwa nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran yang berguna untuk membina rasa bersatu antar penduduk negara yang beraneka ragam yang secara bersama-sama membangun nilai-nilai, semangat, dan patriotisme yang diletakkan dalam semangat pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dengan mempertahankan kedaulatan, integritas, dan identitas bangsa.

### 3. Pendidikan Kewarganegaraan

Secara bahasa, istilah *civic education* oleh sebagian pakar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian berdasarkan literature yang saya baca Kerr (Winataputra & Budimansyah, 2012: 4), mengemukakan bahwa *Citizenship education or civics education* didefinisikan sebagai berikut: *Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process*. Maksud dari pendapat Kerr ini bahwa PKn secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sedangkan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

Cogan (1999:4) mengartikan *civic education* sebagai “*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”, maksudnya adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang

dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

PKn atau *civic education* adalah program pendidikan/pembelajaran yang secara programatik-prosedural berupaya memanusiakan (*humanizing*) dan membudayakan (*civilizing*) serta memberdayakan (*empowering*) manusia dalam hal ini peserta didik, diri dan kehidupannya menjadi warga negara yang baik sebagaimana tuntutan keharusan/yuridis konstitusional bangsa/negara yang bersangkutan (Kosasih djahiri, 2006: 9). PKn adalah sarana yang tepat untuk menginternalisasikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Menurut Komalasari (2011: 88), Pendidikan Kewarganegaraan beresensikan pendidikan nilai, sehingga Pendidikan Kewarganegaraan harus memberikan perhatiannya kepada pengembangan nilai, moral, dan sikap perilaku siswa.

Sementara itu menurut Winataputra & Budimansyah (2012: 1), Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk keperibadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam "*nation and character building*". Dalam konteks ini peran PKn bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada akhirnya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan kebajikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih untuk menduduki jabatan publik. PKn bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good and smart citizens*) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebhinekaan di Indonesia dan mempertahankan integritas nasional.

Selanjutnya menurut Budimansyah & Suryadi (2008: 68), PKn merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

Indonesia melalui koridor "*value-based education*". Konfigurasi atau kerangka sistematis PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut: *Pertama*, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. *Kedua*, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Cholisin (2007: 7), menyatakan bahwa PKn adalah aspek pendidikan politik yang fokus materinya adalah peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Sementara itu, Numan Soemantri (2001: 299) menyatakan bahwa PKn adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya diproses guna melatih siswa untuk berfikir, menganalisis, bersikap dan bertindak secara demokratis.

Berkaitan dengan pengertian PKn ini Somantri (2001:154) menjelaskan

bahwa PKn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Dari beberapa pengertian di atas jelas bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang memiliki fokus pada pembinaan karakter warga negara dalam perspektif kenegaraan, dimana diharapkan melalui mata pelajaran ini dapat terbina sosok warga negara yang baik (*good citizenship*).

Sebagaimana lazimnya suatu bidang studi yang diajarkan di sekolah, materi PKn menurut Branson (1999: 4) harus mencakup tiga komponen, yaitu *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Skills* (keterampilan kewarganegaraan), dan *Civic Disposition* (watak kewarganegaraan). Komponen pertama, *civic knowledge* berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara (Branson, 1999: 8). Aspek ini menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat.

Kedua, *Civic Skills* meliputi keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan intelektual adalah keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang

dialog dengan DPRD. Contoh keterampilan berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan kewajibannya di bidang hukum, misalnya segera melapor kepada polisi atas terjadinya kejahatan yang diketahui.

Ketiga, *Civic Disposition* (watak kewarganegaraan), komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran PKn, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif.

Dari pemaparan di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa dilahirkannya pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan sebagai perisai bagi suatu bangsa untuk menjaga hal-hal buruk atau negatif yang bisa merusak bangsa itu sendiri. Kemudian bagi bangsa Indonesia lahirnya PKn dimaksudkan sebagai wahana untuk membentuk warganegara yang cerdas terampil & berkarakter yang setia kepada bangsa dan Negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai amanat Pancasila & UUD 1945 serta tetap menjaga bangsa ini walaupun terdapat gempuran dari luar tetapi gempuran tersebut tetap ditangkal dengan nilai moral yang ada pada PKn itu sendiri.

#### **4. Perbenturan Kosmopolitanisme & Nasionalisme untuk pendidikan berwawasan global berkarakter local**

Dengan bergabungnya Indonesia dalam sistem global internasional, nasionalisme Indonesia yang dibangun adalah nasionalisme kosmopolitan yang melandaskan bahwa Indonesia sebagai bangsa tidak dapat menghindari dari bangsa lain, namun dengan memiliki nasionalisme kultural keindonesiaan dengan memberikan

kesempatan kepada aktor-aktor di daerah secara langsung untuk menjadi aktor kosmopolit. Dalam konteks dan kecenderungan global ini, semakin banyak orang membayangkan menjadi warga dunia dan terikat pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Karena itulah nilai-nilai dan semangat generasi baru produk modernisasi dan globalisasi sekarang tidak dapat dipahami dalam pengertian lama nasionalisme, yaitu cinta dan pembelaan kepada tanah air secara total bahkan membabi buta. Nilai-nilai, semangat, dan patriotisme mereka mestinya diletakkan dalam semangat pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Secara konseptual terjadi pertentangan antara nilai kosmopolitan dengan nilai nasionalisme, keduanya berada pada kutub yang tarik menarik, dimana nilai kosmopolitan menarik ke ranah global, sedangkan nilai nasionalisme menarik ke ranah eksklusif. Dalam situasi demikian pembelajaran PKn bisa menjadi jembatan mengharmonisasikan kedua nilai tersebut, yakni dengan mekanisme sebagai berikut: (a) Visi dan misi PKn diletakkan dalam koridor pendidikan nilai (*values education*) dimana nilai terintegrasi (*embedded*) dalam materi, proses, dan penilaian; (b) disain pembelajaran PKn diarahkan pada konteks pembinaan kecakapan hidup (*life skills*) untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia; (c) Kelas PKn didisain sebagai laboratorium pembinaan wawasan global tapi mempertahankan karakter lokal yang dimiliki.

Kerangka untuk membangun budaya kosmopolitan dalam dunia pendidikan yang berdasarkan PKn maka dalam proses pelaksanaan pendidikan harus menghilangkan batasan etnis, suku, ras, serta penanaman nilai-nilai yang tertuang dalam PKn dalam rangka memperoleh output yang memiliki wawasan yang luas sehingga menghasilkan suatu budaya kosmopolitan dalam tatanan dunia global seperti halnya sekarang ini.

Dialog dalam masyarakat dunia yang kompleks. Kosmopolitanisme pada dasarnya memberi ruang penting pada peran individu dalam membentuk komunitas. Dengan dampak globalisasi pada relasi-relasi sosial, kosmopolitanisme menegaskan bahwa perbedaan kultur individu, kelompok dan bangsa, dan dialog antar kelompok tersebut, sebagai batu pijakan dalam membangun tatanan komunitas global. Secara umum kosmopolitanisme merupakan harapan ideal tentang warga dunia tanpa perbatasan, Pandangan lintas kultural dalam kosmopolitan ini memberi arti akan pentingnya dialog dalam sebuah komunitas dengan landasan saling mengakui dan menghargai, dimana perbedaan pada manusia dianggap sebagai inti dalam menciptakan kehidupan dunia yang damai.

#### D. KESIMPULAN & SARAN

Secara konseptual terjadi pertentangan antara nilai kosmopolitan dengan nilai nasionalisme, keduanya berada pada kutub yang tarik menarik, dimana nilai kosmopolitan menarik ke ranah global, sedangkan nilai nasionalisme menarik ke ranah eksklusif. Dalam situasi demikian pembelajaran PKn bisa menjadi jembatan mengharmonisasikan kedua nilai tersebut, yakni dengan mekanisme sebagai berikut: (a) Visi dan misi PKn diletakkan dalam koridor pendidikan nilai (*values education*) dimana nilai terintegrasi (*embedded*) dalam materi, proses, dan penilaian; (b) disain pembelajaran PKn diarahkan pada konteks pembinaan kecakapan hidup (*life skills*) untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia; (c) Kelas PKn didisain sebagai laboratorium pembinaan wawasan global tapi mempertahankan karakter local yang dimiliki.

Hendaknya guru PKn untuk memahami secara lebih memadai mengenai kosmopolitanisme dan nasionalisme, agar guru dan siswa dapat membahas serta berdialog dengan secara “proporsional”, ketika perubahan sosial begitu hebat, dengan ditandainya kemajuan teknologi digital (New Media),

seperti telepon selular, internet, Ipad, dsb. Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan rujukan bagi artikel-artikel tetentu kedepan khususnya bidang Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengetahui harmonisasi Kosmopolitan dan Nasionalisme guna membangun karakter bangsa yang bisa dibanggakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief Furqan. (1992). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional
- Arikunto. Suharsimi, (2001), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta.
- Beck, Ulrich (2006) *Cosmopolitan Vision*. Cambridge: Polity Press.
- Branson. (1999). *Belajar "Civic Education" dari Amerika* (Terjemahan Syaripudin, dkk). Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS).
- Budimansyah D dan Suryadi K. (2008). PKN dan Masyarakat Multikultural. Bandung: UPI Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan.
- Calhoun, Craig. (2008). "Cosmopolitanism and nationalism", *nation and nationalism*, vol. 14, no. 3, pp. 427-448.
- Cholisin. (2007). *Materi pokok ilmu kewarganegaraan-pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Cogan, J. J. (1999). *Developing the civic society: the role of civic education*. Bandung: CISED.
- Djahiri, H.A. Kosasih (2006). Esensi pendidikan Nilai Moral Dan PKN Di Era Globalisasi, Dalam Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan menyambut 70 tahun Prof. Drs.H.A. Kosasih Djahiri, Bandung Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) FPIPS-UPI.
- Held. et al. (2004). Introduction dalam Global Transformation, Politics, Economy, and Culture. Stanford University Press.
- Kalidjernih, F. (2009). Puspa Ragam konsep dan Isu Kewarganegaraan (Edisi ke tiga). Bandung. Widya aksara press.
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardawani (2011). Pembinaan semangat nasionalisme Indonesia dalam menghadapi tantangan Kosmopolitanisme dan Etnisitas melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (Studi kasus pada SMP Negeri 1 Entikong, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia)".UPI Bandung. Tesis ini tidak dipublikasikan.
- Mau, S, Mewes, J and Zimmermann. (2008). *Kosmopolitan Attitudes Through transnational Social Practices*. Bremen: Blackwell Publishing.
- Mustika Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.
- Noeng Muhajir. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nowicka and Rovisco. (2009). *Kosmopolitanism in Practice*. Ashgate Publishing; Roma.
- Soejono dan Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapannya*. Jakarta: Reneka Cipta
- Somantri, N. (2001). *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Taniredja, Tukiran dkk. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Tilaar. (2002). *Perubahan sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wicaksana, I Gede Wahyu. (2013). Dalam perkuliahan Kosmopolitanisme, Nasionalisme dan Fundamentalisme Week 2 pada 8 Maret 2013.
- Winarno Surachman. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Tarsita, 1990)
- Winataputra & Budimansyah. (2012). *PKn dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)*. Bandung: Widya Aksara Pers